



## HUBUNGAN POLITIK TAIWAN-TIONGKOK PASCA TERPILIHNYA PRESIDEN BARU TAIWAN

Sita Hidriyah\*)

Abstrak

*Tsai Ing-Wen (Tsai) terpilih menjadi presiden wanita pertama Taiwan setelah berhasil memenangkan pemilihan umum (pemilu) dengan perolehan suara sebanyak 56,1%. Kemenangannya diperkirakan akan mendorong babak baru dalam upaya kemerdekaan Taiwan dari Tiongkok, dan dapat berujung pada ketidakstabilan Tiongkok. Transisi politik yang akan dilewati kedua wilayah menjadi perkembangan politik global berkaitan pada kerjasama ekonomi dan perdagangan yang telah dilakukan. Masa depan Tiongkok dan Taiwan akan diuji dengan jalan damai atau permusuhan yang sepenuhnya bergantung pada pilihan Tsai sendiri. Walaupun Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, hubungan kedua negara diharapkan dapat terus meningkat mengingat kerjasama ekonomi dan perdagangan yang terus mengalami peningkatan.*

### Pendahuluan

Negara Taiwan memasuki babak baru dengan kepemimpinan presiden perempuan yang baru terpilih. Tsai, pemimpin oposisi dari Partai Progresif Demokratik (DPP) memenangi pemilu pada 16 Januari 2016. Tsai juga menjadi presiden perempuan pertama Taiwan sejak memisahkan diri dari Tiongkok usai perang sipil Tiongkok pada 1949. Namun Tsai juga akan menghadapi tugas berat memimpin dengan ratusan misil Tiongkok mengarah ke negaranya. Tsai mengatakan ia akan menciptakan hubungan yang konsisten serta langgeng dengan Tiongkok dan tidak akan bersikap provokatif demi menjaga keadaan sekarang yang tetap (*status quo*). Kedua pihak memiliki tanggung jawab untuk menemukan cara yang sama-sama dapat diterima guna terus berinteraksi dengan rasa hormat dan

hubungan timbal-balik untuk meyakinkan akan tidak adanya provokasi. Siapapun yang menjadi presiden Taiwan tentunya akan menentukan jalan hubungan kedua negara. Kemenangan telak yang membuat Tsai sebagai presiden perempuan pertama di Taiwan membuktikan bahwa para pemilih memalingkan dukungannya terhadap penguasa terdahulu dan partai lawan yang menjalin hubungan lebih dekat dengan Tiongkok.

### Arah Politik Kepemimpinan Baru Presiden Taiwan

Pesta demokrasi negara Taiwan telah memberikan pencerahan baru bagi perkembangan politik. Setidaknya hal tersebut telah diprediksi dengan naiknya Tsai sebagai calon presiden yang kemudian menyingkirkan

\*) Peneliti Muda pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. E-mail: sita.hidriyah@dpr.go.id.



calon dari wakil partai penguasa Kuomintang (KMT) yang bersahabat dengan Tiongkok, Eric Chu dengan perolehan suara 32,5%. Di Taiwan, dukungan untuk DPP sendiri bertambah banyak sejak 2014, ketika ratusan mahasiswa menduduki parlemen Taiwan selama berminggu-minggu untuk menyampaikan protes terhadap undang-undang perdagangan Tiongkok. Dukungan bagi Tsai melonjak karena pemilih makin gelisah atas upaya pendekatan dengan Cina yang dilakukan mantan Presiden Taiwan dari KMT Ma Ying-jeou baru-baru ini. Ma harus lengser setelah memimpin selama dua periode (delapan tahun). Akibat perekonomian stagnan, rakyat Taiwan kecewa atas penandatanganan perjanjian dagang dengan Tiongkok yang bisa mengurangi keuntungan bagi masyarakat umum di Taiwan. DPP lebih berhati-hati mendekati Tiongkok, meskipun Tsai berulang kali menyampaikan keinginannya untuk mempertahankan *status quo*.

Tsai membawa kelompok oposisi yang dipimpinnya untuk menang dan ini menjadi keunggulan bagi kelompok pro-kemerdekaan Taiwan. Banyaknya pendukung Tsai dikarenakan pihak Kuomintang dianggap terlalu dekat dengan Tiongkok sehingga mengakibatkan meningkatnya hubungan dengan Tiongkok. Para pemilih merasa tidak nyaman dengan hubungan yang terlalu dekat tersebut seiring dengan lemahnya perekonomian dan kekecewaan terhadap pakta-pakta perdagangan yang ditandatangani bersama Tiongkok, tetapi gagal memberi keuntungan bagi warga Taiwan. Dalam pidato kemenangannya, Tsai memperingatkan Tiongkok bahwa penindasan akan merugikan hubungan Taiwan dan Tiongkok (hubungan lintas selat). Ia juga menginginkan jika sistem demokrasi, jarak identitas nasional dan internasional harus dihargai. Hal ini dikarenakan penindasan dalam bentuk apa pun akan merugikan stabilitas lintas hubungan kedua negara. Sebelumnya dalam sambutannya Tsai berjanji untuk bekerja menjaga perdamaian dan stabilitas dalam hubungan dengan Tiongkok. Tapi dia menekankan apabila hubungan ke depan harus tetap mencerminkan kehendak masyarakat. Dengan memastikan bahwa tidak ada provokasi atau peristiwa kecelakaan antar-keduanya. Diluar hubungan Tiongkok dan Taiwan, Tsai juga menyerukan kebebasan navigasi di Laut Tiongkok Selatan yang kini tengah disengketakan serta keinginan untuk memperkuat hubungan internasional dengan negara Jepang. Selain itu, Tsai berharap untuk melanjutkan komunikasi dengan Amerika Serikat (AS) yang selama ini dilakukan oleh

partainya. AS memang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, tetapi sangat berguna bagi Taiwan sebagai pendukung dan pemasok senjata.

## Reaksi Tiongkok Atas Kemenangan Presiden Terpilih Taiwan

Pemilu Taiwan dipantau oleh pemerintah Tiongkok dan juga warga Tiongkok. Pantauan tersebut berakibat pada penolakan Tiongkok atas hasil pemilihan presiden Taiwan. Tiongkok mengatakan, urusan Taiwan adalah urusan internal bagi negara tersebut. Hanya ada satu Tiongkok di dunia dan pemilihan presiden di Taiwan tidak mengubah kenyataan ini termasuk pada pengakuan internasional mengenai hasil pemilu. Kemenangan Tsai dalam pemilu Taiwan direspons oleh Tiongkok dengan memberi penegasan terhadap konsensus 1992 yaitu *One China Policy*. Penegasan ini merupakan gambaran bahwa Pemerintah Tiongkok tidak bereaksi berlebihan terhadap perubahan politik di Taiwan dan tetap menginginkan *status quo*. Tidak heran, respons Tsai pun melunak dengan menyatakan bahwa dirinya akan menjamin *status quo* hubungan Taiwan dengan Tiongkok.

Hubungan Tiongkok dan Taiwan telah membaik semenjak presiden sebelumnya, Ma Ying-Jeou, menjabat Presiden Taiwan pada tahun 2008. Ini ditandai adanya hubungan ekonomi yang terus membaik, peningkatan hubungan pariwisata, dan kerja sama pakta perdagangan. Pada tahun 2012 Tiongkok menyambut dengan senang terpilinya kembali Ma. Bahkan kemenangan Ma adalah pilihan yang dibuat warga Taiwan untuk lebih dekat dengan Tiongkok. Hasil pemilu tersebut meningkatkan hubungan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan merupakan keinginan umum semua orang di Taiwan. Namun seiring perkembangan justru rakyat seolah kecewa dengan kepemimpinan Ma yang cenderung menjadi dekat dan bergantung pada Tiongkok. Terbukti dengan munculnya unjuk rasa di Taiwan yang memprotes pertemuan kedua pemimpin di tahun 2015 lalu di Singapura sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat Taiwan.

Menjelang Pemilu kemarin, pemerintah Tiongkok telah berkali-kali menentang kehendak Taiwan untuk merdeka. Lebih jauh lagi, setelah kemenangan Tsai, Kantor Urusan Taiwan Tiongkok memperingatkan akan menentang setiap langkah menuju kemerdekaan Taiwan. Lemahnya pertumbuhan ekonomi Taiwan yang hanya mencapai 1 persen di tahun 2015, dan bertambahnya angka pengangguran

serta stagnansi pendapatan, dapat menyulut gerakan-gerakan pro kemerdekaan Taiwan lebih cepat dalam empat tahun ke depan. Belum lagi publik Taiwan tidak merasa puas terhadap eratnya hubungan Taiwan dengan Tiongkok pada era Presiden sebelumnya yang dianggap menyebabkan ketergantungan dan menghilangkan independensi Taiwan. Kemenangannya diperkirakan akan mendorong babak baru dalam upaya kemerdekaan Taiwan dari Tiongkok, dan dapat berujung pada ketidakstabilan di Tiongkok. Selain itu, Pemerintah Tiongkok juga bertekad untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan ketidakpedulian akan perubahan yang mungkin terjadi di Taiwan. Namun, Pemerintah Tiongkok tidak akan pernah mengubah kebijakan untuk menentang kemerdekaan resmi Taiwan dan teguh pada satu kesatuan yaitu daratan dan Taiwan milik Tiongkok.

Hasil dari pemilihan presiden di Taiwan tidak mengubah fakta dan konsensus masyarakat internasional. Pemerintah Tiongkok sangat berharap dunia internasional mengambil langkah-langkah nyata untuk mendukung pengembangan damai hubungan lintas Selat Taiwan. Selain itu, Tiongkok perlu menghargai demokrasi di Taiwan. Hal ini sebagai penegasan untuk dapat memastikan bahwa kedua pihak memiliki tanggung jawab untuk menemukan cara-cara yang dapat diterima bagi stabilitas keamanan kawasan. Kemenangan Tsai memang telah berhasil menuliskan sejarah baru bagi Taiwan, tetapi dari kemenangan itulah Tiongkok justru melihat dapat memicu eskalasi dalam hubungan kedua negara.

### Arah Hubungan Tiongkok Taiwan

Jika melihat kembali dari sejarah, Tiongkok dan Taiwan sudah berkonflik sejak lama. Pada saat dua partai berseteru yaitu Partai Komunis Tiongkok dengan Partai Nasionalis Tiongkok di masa perang saudara, pertikaian tersebut diakhiri pada tahun 1949 dengan proklamasi berdirinya Republik Rakyat Tiongkok oleh Partai Komunis Tiongkok. Sementara Partai Nasionalis Tiongkok tidak menerima hal tersebut sehingga Tiongkok dan Taiwan sama-sama mengklaim seluruh bagian Tiongkok sebagai wilayahnya. Hubungan kedua wilayah menjadi sangat rumit. Taiwan dan Tiongkok sama-sama menyebut diri sebagai "Tiongkok". Hingga tahun 1971, Taiwan memegang kursi perwakilan Tiongkok di PBB sebelum kalah pengaruh dari Partai Komunis

di Beijing. AS yang sejak lama menentang pemerintahan komunis Tiongkok selama bertahun-tahun hanya membuka kantor perwakilan di Taiwan. Tetapi pada tahun 1979 saat menormalisasi hubungan dengan Beijing, Washington memindahkan kedutaan besar ke Tiongkok dan menutup perwakilan diplomatik di Taiwan. Secara teknis, Tiongkok dan Taiwan masih dianggap satu negara oleh pihak Kuomintang dan Partai Komunis. Hal yang sama juga diterapkan melalui hubungan diplomatik, atau yang dikenal dengan "Satu Tiongkok." Kebijakan ini membuat banyak negara harus memilih hubungan diplomatik, dengan Taiwan atau Tiongkok. Namun hal ini tidak menyurutkan kerja sama diplomatik walau dengan wujud lain. Biasanya, Taiwan memiliki kantor dagang dan ekonomi di negara-negara lain, yang berfungsi mirip kedutaan besar.

Dengan semakin meningkatnya hubungan politik dan keamanan, hubungan Tiongkok dan Taiwan juga telah memasuki babak baru. Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 60 tahun terakhir, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Ma Ying-jeou melakukan pertemuan pada 7 November 2015 di Singapura. Negeri Singa itu dipilih karena pada saat itu di Taiwan sedang menghadapi sentimen anti-Tiongkok yang tengah menguat menjelang pemilu.

Tiongkok dan Taiwan memang selayaknya tidak akan pernah terpisahkan, karena kedua negara tersebut adalah saudara. Jika dilihat selama 66 tahun pembangunan dari hubungan lintas selat menunjukkan bahwa jarak waktu dan adu kekuatan dapat memungkinkan membuat kedua negara terpisah. Saat ini, perkembangan hubungan lintas selat dihadapkan dengan pilihan arah dan jalan. Pertemuan antar keduanya dapat dikatakan sebagai pertemuan bersejarah dan mungkin saja tidak akan terulang sehingga prestasi perkembangan damai hubungan lintas-selat diharapkan tidak akan hilang. Kedua negara harus mempunyai tekad besar untuk mempromosikan perdamaian dan hubungan yang berlangsung harus didasarkan pada ketulusan, kebijaksanaan dan kesabaran. Adanya pertemuan tersebut semakin menipiskan rasa kecemasan akan meledaknya konflik atau perang antara Tiongkok versus Taiwan. Ini didukung fakta meski di tataran politik Tiongkok-Taiwan bermusuhan, pada sektor ekonomi, khususnya dalam hal bisnis dan investasi, keduanya justru bisa saling bermitra mengingat sejak tahun 2002 Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar bagi Taiwan.

Beragam reaksi diutarakan masyarakat

Taiwan akan masa depan pulau tersebut. Rakyat berpendapat bahwa tidak mungkin Tsai melakukan perbuatan untuk memprovokasi Beijing jika dia memenangi pemilu. Hubungan keduanya akan menjadi rumit dan tidak bisa diprediksi. Mereka akan memperburuk beberapa pencapaian, namun pada saat yang sama kepentingan Beijing mempertahankan Taiwan tergantung secara ekonomi dan upaya masing-masing pihak untuk tetap menjaga perdamaian. Taiwan membutuhkan perubahan ekonomi dan politik. Bagi Tsai, masa depan Taiwan bukan Tiongkok, tetapi dunia. Dengan menjadi presiden, Tsai akan didorong masuk ke dalam salah satu pekerjaan paling sulit dan berbahaya di Asia. Tsai pun harus mampu menyeimbangkan kepentingan antara negara adidaya Tiongkok, yang juga mitra dagang terbesar Taiwan, dengan AS sebagai rujukan kebebasan dan tempat demokratis.

Kubu KMT harus mengakui kekalahan mereka dari partai oposisi. Jika DPP memilih Taiwan merdeka atau terpisah dari Tiongkok, ketegangan akan muncul. Bukan hanya bangsa Taiwan yang khawatir, tapi juga kalangan internasional termasuk AS yang terikat undang-undang memungkinkan upaya agar Taiwan mempertahankan diri. Presiden Tsai menjadi simbol baru kebangkitan Asia yang akan menghadapi persoalan yang tidak jauh dengan para pendahulunya. Keinginan untuk memperkuat status Taiwan di luar negeri menunjukkan jika seorang pemimpin memang sudah selayaknya mengutamakan keinginan rakyat sehingga apa yang menjadi tujuan dapat segera tercapai.

## Penutup

Kemenangan Tsai tidak berarti hanya kemenangan pemilu. Hasil Pemilu ini menunjukkan bahwa rakyat menginginkan pemerintahan yang lebih banyak mendengarkan aspirasi rakyatnya serta pemerintahan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemunculan Presiden Tsai sebagai kekuatan politik di pemerintahan dan kelompok oposisi akan menjunjung transisi demokrasi di Taiwan. Secara teknis, Tiongkok dan Taiwan masih dianggap satu negara. Taiwan dan Tiongkok diperkirakan masih dapat bermitra secara sejajar sehingga otomatis martabat Taiwan akan terangkat dengan sendirinya di mata dunia internasional. Pertemuan kedua presiden di tahun 2015 menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kedua negara menjalin kerjasama

walaupun bertikai. Kebijakan hubungan diplomatik dengan memilih Tiongkok, yang juga dilakukan Indonesia, tidak akan menyurutkan kerjasama dalam wujud lain. Semakin bertambahnya jumlah pemimpin perempuan di dunia dengan kemenangan Tsai menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam politik Asia bukan sesuatu yang baru dan menjadi kebutuhan penting dalam mengelola serta menata hubungan internasional.

Berlangsungnya demokrasi Taiwan telah menjadi teladan di Asia tidak terkecuali bagi Indonesia. Indonesia dengan Taiwan telah lama membina hubungan bilateral ekonomi perdagangan dan investasi, terkecuali politik. Hingga saat ini Indonesia tetap memegang prinsip satu negara yaitu Tiongkok. Masalah Taiwan merupakan isu yang sensitif bagi Pemerintah Tiongkok sehingga Indonesia menegaskan untuk tidak ingin dan ikut mencampuri urusan dalam negerinya. Indonesia berharap agar Pemerintah Tiongkok dapat memahami betul mengenai posisi hubungan Indonesia dengan Taiwan dan juga sebaliknya. Dengan terpilihnya presiden baru Taiwan, peningkatan kerjasama Indonesia dan Taiwan diharapkan dapat terus ditingkatkan mengingat potensi besar yang dimiliki kedua negara.

## Rujukan:

- “China, Economy Tests For Taiwan Presidential Winner Tsai”, *The Jakarta Post*, 17 Januari 2016.
- “Cina Tolak Akui Hasil Pemilu Presiden Taiwan”, *Republika*, 17 Januari 2016.
- “Pemimpin Oposisi Taiwan Tsai Ing-wen Menang Pemilu”, *Kompas*, 17 Januari 2016.
- “Taiwan Menyongsong Terpilihnya Perempuan Pertama Presiden”, *Kompas*, 16 Januari 2016.
- “Tsai Pertahankan “Status Quo”, *Kompas*, 18 Januari 2016.
- “Tsai Ing-Wen Presiden Wanita Taiwan”, *Sindo*, 17 Januari 2016.
- “Oposisi Menang, Taiwan Punya Presiden Perempuan Pertama”, <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160117132058-113-104814/oposisi-menang-taiwan-punya-presiden-perempuan-pertama/>, diakses 21 Januari 2016.
- “Pemilu Taiwan Mulai Berlangsung”, [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160116\\_dunia\\_pemilu\\_taiwan](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160116_dunia_pemilu_taiwan), diakses 19 Januari 2016.